

SINOPSIS

Dalam rangka melaksanakan proyek-proyek pembangunan, tanah merupakan salah satu sarana yang sangat penting dan masalah pembebasan tanah untuk kepentingan umum tersebut tidaklah mudah dipecahkan seperti halnya yang terjadi dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum disekitar bantaran sungai kedung bener tahun 2003-2004 melalui proyek pelebaran sungai jawa bagian selatan atau proyek Normalisasi sungai jawa bagian selatan guna mengantisipasi bahaya banjir. Dalam proyek yang dijalankan ini banyak menuai permasalahan menyangkut status tanah yang akan dibebaskan, hasil inventarisasi tanah, bangunan, tanaman sampai pada permasalahan ganti rugi atas tanah dan apa yang ada diatasnya. Oleh karena itu, bagaimana peranan Badan Pertanahan Kabupaten Kebumen dalam mengatasi dan memecahkan masalah pembebasan tanah untuk kepentingan umum disekitar bantaran sungai kedung bener tahun 2003-2004 di desa jatisari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Badan Pertanahan Kabupaten Kebumen dalam proses dan pelaksanaan program pembebasan tanah untuk kepentingan umum disekitar banataran sungai kedung bener tahun 2003-2004. Adapun penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan pencarian data menggunakan data yang diperoleh langsung dari responden yang bersangkutan. Teknik pengumpulan data menggunakan interview dan dokumentasi yang mencatat semua aktivitas BPN dalam proses pembebasan tanah disekitar bantaran sungai kedung bener.

Dalam penelitian ini dapat menjawab tentang peranan BPN di kabupaten Kebumen dalam proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum disekitar bantaran sungai kedung bener tahun 2003-2004, adalah BPN sebagai fasilitator pembebasan tanah yang bertugas menyediakan catatan-catatan keberadaan tanah yang dibutuhkan dan bertugas sebagai moderator untuk pemohon dan pemilik tanah dalam proses pembebasan tanah tersebut. BPN juga melakukan proses dari permohonan pembebasan tanah dan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaanya sampai pada penyelesaian berbagai masalah yang menyangkut proses pembebasan tanah.

Untuk lebih meningkatkan kinerja BPN, kualitas SDM aparat harus ditingkatkan, kerjasama yang baik antara BPN, aparat desa dan masyarakat pemohon maupun pihak-pihak lain lebih ditingkatkan agar lebih baik dan lancar dalam melaksanakan program pembebasan tanah serta ditingkatkannya konsolidasi dengan masyarakat diharapkan pembebasan tanah untuk pembangunan lebih untuk kepentingan bersama.